PERAN TAMBAHAN MODAL TERHADAP PENDAPATAN USAHATANI PADI DI KABUPATEN BLITAR DAN NGAWI, JAWA TIMUR

Hari Hermawan dan Harmi Andrianyta

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 10 Cimanggu Bogor
Email : hari_deef@yahoo.co.id

Diterima: 7 April 2013; Disetujui untuk publikasi: 4 Juli 2013

ABSTRACT

Role of Capital Increase Against Rice Farming Income in Blitar and Ngawi Regency, East Java. The assessment aims to analyze the role of additional capital to income derived from rice farming PUAP done in Blitar and Ngawi in 2010. Assessment involves 12 Gapoktan deliberately chosen based ranking of member Gapoktan and farmers as the unit of analysis. Primary data were collected by interviews with 32 respondents representing Gapoktan equipped with focus group discussions on each of the key figures who are competent. Primary data collected consisted of the use of capital farmers, farm land size, the amount of financial aid received, productivity and farm income. Results of data analysis using quantitative and qualitative descriptive approach shows the following matters namely farmers utilize additional capital for the purchase of PUAP components of fertilizers and pesticides that are considered important to increase farm productivity. Where the revenue increase is a reflection of increased farm productivity that occurs as the optimal use of technology. But the success of the use of BLM PUAP boost farmers' income, irrespective of the good control by Gapoktan.

Key words: *Rice, additional fund, rural business development agribusiness, farm income*

ABSTRAK

Pengkajian yang bertujuan untuk menganalisis peran tambahan modal yang bersumber dari PUAP terhadap pendapatan usahatani padi dilakukan di Kabupaten Blitar dan Ngawi akhir tahun 2010. Pengkajian melibatkan 12 Gapoktan yang dipilih secara sengaja berdasarkan pemeringkatan Gapoktan dan petani anggota Gapoktan sebagai unit analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap 32 orang responden mewakili Gapoktan dilengkapi dengan diskusi kelompok terfokus terhadap tokoh kunci yang kompeten. Data primer yang dikumpulkan terdiri dari penggunaan modal petani, luas garapan usahatani, besarnya bantuan modal yang diterima, produktivitas dan pendapatan usahatani. Hasil analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif menunjukkan sebagai berikut yakni petani memanfaatkan tambahan modal dari PUAP untuk pembelian komponen-komponen pupuk dan pestisida yang dianggap penting untuk peningkatan produktivitas usahatani. Dimana peningkatan pendapatan ini merupakan refleksi peningkatan produktivitas usahatani yang terjadi karena penggunaan teknologi yang optimal. Namun keberhasilan pemanfaatan BLM PUAP dalam mendorong peningkatan pendapatan petani, tidak tergantung dari pengendalian yang baik oleh pengurus Gapoktan.

Kata kunci: *Padi, tambahan modal, PUAP, pendapatan usahatani*

PENDAHULUAN

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha pertanian (Mosher, 1978). Namun, dalam operasional usahanya tidak

semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat

perdesaan. Nurmanaf (2007) dan Syukur (2008) berpendapat bahwa petani sulit mendapatkan akses dari bank karena tidak dapat memenuhi ketentuan perbankan dan juga karena alokasi kredit untuk sektor pertanian relatif kecil yaitu sekitar 6 persen.

Hal ini senada dengan pendapat Hendayana *et al.* (2009) bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah lemahnya permodalan sementara aksesibilitas terhadap sumber permodalan, pasar dan teknologi (Kushartanti *et al.*, 2011) serta organisasi tani masih lemah. Rendahnya penguasaan modal ini menyebabkan tingkat adopsi teknologi di tingkat petani menjadi rendah, yang akhirnya berakibat rendahnya produktivitas usahatani (Omobolanle dan Olu, 2006) Dengan demikian tidak jarang ditemui bahwa kekurangan modal menjadi penghambat bagi petani dalam menerapkan teknologi secara utuh (Bagheri *et al.*, 2008) dan mengembangkan usahatani.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan yang berakar dari kesulitan permodalan ini, salah satunya dengan meluncurkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP), yang dimulai sejak tahun 2008. Program PUAP merupakan terobosan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk: (1) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT), (3) memberdayakan kelembagaan tani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis, dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan (Kementerian Pertanian, 2010). Pada dasarnya program PUAP mengemban misi memberdayakan masyarakat perdesaan secara partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam operasionalnya program ini menyediakan fasilitasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), sebagai tambahan modal usaha untuk mendukung gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sasarannya adalah petani anggota, pemilik, penggarap, buruh tani maupun rumah

tangga tani. Dengan fasilitasi modal melalui PUAP ini diharapkan mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

Keberadaan LKM-A menjadi salah satu solusi dalam mengelola keuangan dan pembiayaan sektor pertanian, utamanya untuk agribisnis berskala kecil di perdesaan (Hermawan dan Andrianyta, 2012; Hendayana *et al.*, 2008). Lembaga ini berperan menyalurkan pinjaman modal usahatani untuk mengatasi keterbatasan modal, karena jasanya relatif kecil sehingga mengurangi ketergantungan petani kepada pelepas uang (rentenir) (Ashari, 2009). Tambahan modal usahatani secara normatif akan meningkatkan kemampuan petani menggunakan teknologi sehingga mendorong peningkatan produktivitas usahatani, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan usahatani, bahkan lebih luas lagi terhadap kesejahteraan petani.

Permasalahannya, sejauhmanakah tambahan modal dari dana BLM PUAP itu dapat meningkatkan pendapatan usahatani anggota Gapoktan?. Berkenaan dengan permasalahan tersebut pengkajian bertujuan menganalisis peran tambahan modal terhadap pendapatan usahatani padi, dengan mengambil kasus pada penerima BLM PUAP di Kabupaten Blitar dan Ngawi.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu Pengkajian

Pengkajian dilaksanakan di Kabupaten Blitar dan Ngawi, yang ditentukan secara sengaja (*purposive*) atas dasar jumlah Gapoktan terbanyak pada tahun 2008 di Provinsi Jawa Timur. Kecamatan contoh di Blitar meliputi Doko, Wlingi, Gandusari dan Kanigoro, dan di Ngawi adalah Kecamatan Kwadungan dan Karangjati. Pengkajian dilaksanakan pada akhir tahun 2010.

Jenis dan Sumber Data

Pembahasan berdasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi aspek input dan output usahatani padi pada kondisi sebelum dan sesudah menerima dana BLM PUAP tahun 2008. Pengumpulan data primer

dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan petani contoh anggota Gapoktan penerima dana BLM PUAP. Data sekunder dikumpulkan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, Dinas Pertanian Kabupaten, dan instansi terkait lainnya.

Unit analisis pengkajian adalah petani anggota Gapoktan yang dipilih secara acak sederhana dari Gapoktan peringkat I, II dan III di Kabupaten Blitar dan Ngawi. Masing-masing peringkat diwakili dua Gapoktan sehingga satu kabupaten terdapat enam Gapoktan. Dari setiap Gapoktan dipilih 2-3 orang petani contoh, sehingga diperoleh 18 orang petani di Blitar dan 14 orang petani di Ngawi. Dengan demikian jumlah keseluruhan sebanyak 32 orang petani contoh.

Analisis Data

Untuk mengetahui peran tambahan modal PUAP terhadap modal petani digunakan pendekatan (1) :

$$\Delta \text{Modal} = \frac{(M_b - M_a)}{M_a} \times 100\% \dots (1)$$

Keterangan :

- $\Delta \text{ Modal}$ = Persentase penambahan modal (%)
- M_a = Modal awal petani (Rp)
- M_b = Modal baru (modal petani + BLM PUAP) (Rp)

Tambahan modal dari PUAP merupakan hutang bagi petani, yang harus dikembalikan dengan jasa sebesar 1,9 persen per bulan. Perhitungan jumlah hutang yang harus dibayar petani dirumuskan menurut persamaan (2) (Hermawan dan Hendayana, 2011) :

$$d = \bar{f}_{BLM} + (t \cdot i \cdot \bar{f}_{BLM}) \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- d (*debt*) = Hutang (Rp)
- $\bar{f}$ (*fund*) = Rata-rata dana BLM yang diterima petani (Rp)
- t (*time*) = Jangka waktu pinjaman (bulan)
- i (*interest*) = Jasa pinjaman (%)

Untuk menganalisis peran tambahan modal terhadap pendapatan usahatani setelah petani mendapatkan dana BLM PUAP dilihat dari

kelayakan teknis dan ekonomis menggunakan *Revenue Cost Ratio* (R/C), dan *Marginal Benefit Cost Ratio* (MBCR) (Darsono, 2008; Elisabeth *et al.*, 2006), dengan formula sebagai berikut (3) :

$$\frac{R}{C} = \frac{TR}{TC} = \frac{P_q \cdot Q}{TFC + TVC} \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- TR = Total *revenue*/total penerimaan
- TC = Total *cost*/total biaya
- P_q = *Price output*/harga output
- Q = *Quantity output*/jumlah output
- TFC = *Total fixed cost*/total biaya tetap
- TVC = *Total variable cost*/total biaya tidak tetap terdiri atas biaya pembelian benih, pupuk, pestisida dan tenaga kerja.

Kriteria kelayakan teknis adalah jika $R/C > 1$ usahatani layak, $R/C < 1$ usahatani tidak layak, dan $R/C = 0$ usaha tani impas (tidak untung maupun merugi).

Untuk mengungkap peran BLM terhadap pendapatan usahatani, dilakukan melalui telaahan struktur pembiayaan dan penerimaan usahatani dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan tambahan modal. Dengan pendekatan tersebut kemudian dihitung rasio tambahan modal terhadap tambahan pendapatan usahatani, dengan analisis *Marginal Benefit Cost Ratio* (MBCR) (Swastika, 2004). Secara matematis dirumuskan seperti pada persamaan (4) :

$$MBCR = \frac{I_{f2} - I_{f1}}{TC_2 - TC_1} \dots \dots (4)$$

Keterangan:

- I_{f2} = Pendapatan petani setelah mendapatkan tambahan modal PUAP (Rp)
- I_{f1} = Pendapatan petani sebelum mendapatkan tambahan modal PUAP (Rp)
- TC_2 = Total biaya usahatani setelah mendapatkan tambahan modal PUAP (Rp)
- TC_1 = Total biaya usahatani sebelum mendapatkan tambahan modal PUAP (Rp)

Kaidah keputusannya, semakin besar nilai MBCR yang diperoleh semakin besar peran tambahan modal terhadap pendapatan usahatani padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Tambahan Modal PUAP Terhadap Modal Petani

Peran tambahan modal PUAP terhadap modal petani (Modal awal/Ma) yang menyebabkan terjadinya pembentukan Modal baru (Mb) yakni sebesar 33,95%. Petani mendapatkan tambahan dari dana BLM PUAP cukup bervariasi yang berkisar antara Rp300 ribu – Rp1,3 juta, tergantung Rencana Usaha Anggota (RUA). Hasil wawancara diperoleh rata-rata tambahan modal Rp1,024 juta (Tabel 1).

Tabel 1. Keragaan modal petani contoh (N=32)

Uraian	Modal awal (Ma) (Rp)	Modal Pinjaman (PUAP) (Rp)	Modal Baru (Mb) (Ma + PUAP) (Rp)
Rata-rata	3.016.603	1.024.281	4.040.884
Maksimal	6.000.000	1.600.000	7.600.000
Minimal	1.000.000	300.000	1.300.000

Keterangan:

Modal awal (Ma) = Modal petani sebelum mendapat PUAP

Modal Baru (Mb) = Modal petani setelah mendapatkan PUAP atau Gabungan (Modal awal + PUAP)

Jika ditelaah lebih detail, untuk masing-masing sumber modal petani contoh disajikan secara berturut-turut pada Tabel 2, 3, dan 4.

Tabel 2. Distribusi modal petani contoh berdasarkan modal sendiri (Modal awal)

Modal awal (Rp)	N	%
> 3.000.001	16	50,00
2.000.001 - 3.000.000	8	25,00
1.000.001 - 2.000.000	4	12,50
500.000 - 1.000.000	4	12,50
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Tabel 3. Distribusi modal petani contoh berdasarkan modal pinjaman (BLM PUAP)

Besar Pinjaman PUAP (Rp)	N	%
> 1.500.001	10	31,25
1.000.001 - 1.500.000	8	25,00
500.001 – 1.000.000	9	28,13
300.000 – 500.000	5	15,63
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Tabel 4. Distribusi modal petani contoh berdasarkan modal gabungan (modal baru)

Modal baru (Mb) (Modal sendiri + dana BLM PUAP) (Rp)	N	%
> 4.000.001	16	50,00
3.000.001 - 4.000.000	6	18,75
2.000.001 - 3.000.001	6	18,75
1.000.000 – 2.000.000	4	12,5
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 – 4, diketahui gambaran sebaran modal petani contoh sebagai modal awal. Modal awal yang dimiliki petani contoh antara Rp1 juta - Rp6 juta. Sebaran modal awal ini tergantung pada luasan lahan yang digarap oleh petani contoh. Jika petani contoh memiliki luas lahan ≥ 1 hektar, maka modal awal yang mampu disediakan oleh petani contoh berkisar Rp3 juta – Rp6 juta. Sedangkan jika luas lahan ≤ 1 hektar, modal awal yang mampu disediakan berkisar Rp1 juta – Rp3 juta. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan penyediaan modal awal tergantung pada luas lahan yang petani contoh miliki.

Untuk sebaran modal pinjaman (dana PUAP), petani contoh yang memiliki modal awal $\leq$ Rp3 juta, umumnya mereka mendapatkan pinjaman berkisar antara Rp300 ribu – Rp1 juta. Sedangkan petani contoh yang memiliki modal awal $\geq$ Rp3 juta, rata-rata mereka mendapatkan pinjaman berkisar antara Rp1 juta – Rp1,5 juta. Besaran nominal pinjaman tersebut, diberikan oleh Gapoktan kepada petani contoh berdasarkan usulan RUA. Selain itu besaran pinjaman ini disesuaikan juga dengan jumlah modal awal atau kepemilikan

lahan yang digarap oleh petani contoh. Namun tidak menutup kemungkinan, ada saja petani contoh yang meminjam modal melebihi plafond kredit yang sudah disepakati di dalam AD/ART Gapoktan atau rapat anggota. Dalam kasus ini Gapoktan di kabupaten contoh tetap mengawasi penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP. Ada *reward and punishment* atau sanksi sosial yang diterapkan oleh Gapoktan bagi petani anggota yang melakukan pelanggaran. Hal ini lah yang menjadi pembatas (*boundary*) terhadap penggunaan dana PUAP yang bukan peruntukannya, misalnya untuk kegiatan konsumsi rumah tangga.

Dari keseluruhan petani contoh jika dilihat dari aspek layak atau tidak layak dalam hal pemberian pinjaman melalui pendekatan *debt ratio*, maka terdapat 4 – 6 orang petani contoh yang kurang layak diberikan pinjaman (Tabel 5). *Debt ratio* adalah rasio hutang terhadap pendapatan atau modal sendiri. *Debt ratio* disebut juga dengan skor kredit nasabah.

Tabel 5. Distribusi *debt ratio* modal pinjaman terhadap modal sendiri (modal awal)

<i>Debt. Ratio (%)</i>	N	%
> 40,1	4	12,50
30,1 - 40	17	53,13
20,1 - 30	11	34,38
10,1 - 20	0	0
Jumlah	32	100

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Berdasarkan perhitungan *debt ratio*, keenam petani tersebut memiliki nilai *debt ratio* $\geq 36\%$, mengingat ketentuan batas layak secara rasio dibawah angka 36%. Hal ini disebabkan antara besaran modal awal yang dimiliki berbanding besaran pinjaman hampir sama besar, bahkan ada yang lebih besar nilai pinjamannya. Petani contoh yang memiliki nilai *debt ratio* $\geq 36\%$, yaitu petani yang memiliki rata-rata modal kurang dari Rp3 juta dan memiliki luas lahan ≤ 1 hektar, utamanya dibawah 0,5 hektar. Esensinya, modal pinjaman dalam hal ini PUAP kurang layak jika diberikan kepada petani yang memiliki rata-rata modal awal kecil dan luas lahan yang sempit (petani gurem). Hal ini tentunya dengan berbagai pertimbangan resiko yang akan dihadapi, salah

satunya kemungkinan terjadi kredit macet. Namun pertimbangan *debt ratio* ini sulit diterapkan, mengingat petani anggota Gapoktan di kabupaten contoh sangat mengedepankan rasa kebersamaan dan kemanusiaan. Jika ada kredit macet umumnya dikenakan sanksi yang dikenal tanggung renteng pada kelompok taninya. Tapi jika kasus ini terulang maka sanksi sosial yang langsung akan diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Gapoktan di kabupaten contoh, sanksi sosial yang diterapkan di antaranya tidak diberikan pinjaman, bahkan sampai dikeluarkan dari keanggotaan Gapoktan.

Peran Tambahan Modal PUAP Terhadap Struktur Pembiayaan dan Pendapatan Usahatani

Tambahan modal PUAP berkontribusi terhadap struktur pembiayaan usahatani petani contoh. Kontribusinya mencapai 33,96%. Berdasarkan hasil penelitian Zhu (2006), nilai kontribusi BLM PUAP di Jawa Timur hampir setara dengan proporsi pinjaman yang diberikan di India dan China untuk sektor prioritas (pertanian). Sedangkan menurut Cressy (2006), negara maju seperti Eropa, bantuan modal untuk pertanian skala besar berkisar antara 4,5-6%, namun untuk pertanian tradisional proporsinya lebih besar yaitu sekitar 20%.

Tambahan modal ini digunakan petani contoh untuk membeli pupuk (Urea, TSP, NPK, KCl dan kandang), pestisida, dan membayar upah tenaga kerja. Sehingga untuk ketiga komponen tersebut terjadi peningkatan berturut-turut 47,56 persen; 57,54%; dan 35,54% (Tabel 6). Hal ini berindikasi bahwa pemanfaatan tambahan modal digunakan untuk pembelian ketiga komponen tersebut. Dari Tabel 6, diketahui bahwa tambahan modal yang diterima petani dari PUAP orientasinya lebih banyak dimanfaatkan untuk membeli pupuk dan pestisida. Untuk pembelian benih dan pembayaran upah tenaga kerja, petani menggunakan modal sendiri. Petani memanfaatkan tambahan modal dari PUAP untuk komponen-komponen teknologi yang dianggap perlu ditingkatkan.

Tabel 6. Realisasi pemanfaatan tambahan modal untuk pembelian input produksi

Uraian	Nilai Modal awal (Ma)		Nilai Modal Baru (Mb)		(+/-) (%)
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
Benih	223102	7,40	142.875	3,54	(35,96)
Pupuk	765.906	25,39	1.130.172	27,97	47,56
Pestisida	89.719	2,97	141.344	3,5	57,54
Tenaga Kerja	1.937.784	64,24	2.626.494	65	35,54
Jumlah	3.016.511	100	4.040.884	100	104,68

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Dalam struktur pembiayaan usahatani (Tabel 7), sebelum dan sesudah adanya tambahan modal usaha dari dana BLM PUAP sangat nampak perbedaannya, khususnya pada pemakaian pupuk, pestisida dan tenaga kerja, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Dengan dukungan dana BLM PUAP kebutuhan input produksi tercukupi, sehingga mendorong peningkatan produktifitas hampir 2 t/ha. Peningkatan produktivitas itu meningkatkan total penerimaan (*total revenue*) usahatani petani. Jika sebelum mendapatkan tambahan modal total penerimaan petani Rp10,5 juta/ha, setelah mendapatkan tambahan modal meningkat menjadi

Rp16,5 juta/ha atau terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp6,1 juta/ha (57,02%).

Pendapatan usahatani setelah adanya tambahan modal mencapai Rp12,4 juta namun nilai ini belum merupakan pendapatan bersih, karena petani masih ada kewajiban membayar hutang (*risk premium*). Jumlah hutang yang harus dikeluarkan terdiri pokok Rp1.024.281, ditambah jasa 1,9% selama 4 bulan sebesar Rp77.845, sehingga jumlah hutang sebesar Rp1.102.127. Besarnya hutang tersebut dihitung dari:

$$\text{Hutang} = \text{Rp}1.024.281 + \left(4 \cdot \frac{1,9}{100} \cdot \text{Rp}1.024.281\right)$$

$$\text{Hutang} = \text{Rp}1.102.281$$

Setelah dikurangi biaya untuk melunasi hutang, pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp11.316.140. Dibandingkan dengan pendapatan sebelum mendapat tambahan modal, pendapatan tersebut meningkat sebesar 51,57%.

Berdasarkan hasil analisis *Revenue Cost Ratio* (R/C) setelah mendapatkan tambahan modal, diperoleh nilai 4,07 yang meningkat 17,21%. Sedangkan untuk hasil analisis *Benefit Cost Ratio* (B/C) diperoleh nilai 2,8 yang meningkat 13,15% dari kondisi sebelum PUAP. Dengan memperhatikan kedua nilai ini maka tambahan modal dari PUAP secara finansial meningkatkan nilai tambah usahatani.

Tabel 7. Struktur pembiayaan dan pendapatan usahatani petani contoh (N=32)

Uraian	Sebelum PUAP (Rp)	Sesudah PUAP (Rp)	(Perubahan) (%)
Biaya (<i>Cost</i>)			
Benih	223.102	142.875	(35,96)
Pupuk	765.906	1.130.172	47,56
Pestisida	89.719	141.344	57,54
Tenaga Kerja	1.937.784	2.626.494	35,54
Total Biaya (TC)	3.016.511	4.040.884	33,96
Penerimaan (<i>revenue</i>)			
Produksi (Kg/ha)	3.494,14	5.486,38	57,02
Harga	3.000	3.000	
Total Penerimaan (TR)	10.482.421,88	16.459.151,13	
Pendapatan (<i>income</i>)	7.465.910,94	12.418.266,75	66,33
Pengembalian Pinjaman PUAP (<i>risk premium</i>)	0	1.102.127	
Pendapatan Bersih (<i>net income</i>)	7.465.910,94	11.316.140,13	51,57
B/C	2,47	2,80	
R/C	3,47	3,80	
MBCR		3,76	

Sumber : Data Primer, 2010 (diolah)

Dari analisis *Marginal Benefit Cost Ratio* (MBCR) sebesar 3,76 menunjukkan setiap penambahan modal sebesar Rp100 ribu meningkatkan pendapatan sebesar Rp376 ribu. Keberhasilan pengelolaan tambahan modal itu tidak terlepas dari peran para pengurus Gapoktan dalam pengendalian penyalurannya. Pengurus berperan mengawal penggunaan tambahan modal oleh petani sehingga pemanfaatannya tidak menyimpang dari pembiayaan usahatani.

KESIMPULAN

1. Petani memanfaatkan tambahan modal dari PUAP untuk pembelian komponen-komponen pupuk dan pestisida yang dianggap penting untuk peningkatan produktivitas usahatani. Tambahan modal mendorong petani untuk menerapkan teknologi secara optimal sehingga produktivitas usahatani meningkat. Usaha tani padi di Kabupaten Blitar dan Ngawi dapat menjadi contoh pemanfaatan BLM PUAP yang berhasil mendorong peningkatan pendapatan.
2. Peningkatan pendapatan merupakan refleksi peningkatan produktivitas usahatani yang terjadi karena penggunaan teknologi yang optimal. Keberhasilan pemanfaatan BLM PUAP dalam mendorong peningkatan pendapatan petani tidak terlepas dari pengendalian yang baik dari pengurus Gapoktan.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian* 7(1): 21-42. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.

Bagheri, A., H. Shabanali Fami, A. Rezvanfar, A. Asadi and S. Yazdani. 2008. Perceptions of paddy farmers towards sustainable agricultural technologies: case of haraz catchments area in Mazandaran province of Iran. *American Journal of Applied Sciences* 5 (10): 1384-1391.

Cressy, Robert. 2006. *Venture Capital. The Oxford Handbook of Entrepreneurship*. Oxford University Press Inc. New York.

Darsono. 2008. *Metodologi Riset Agribisnis Buku II Metode Analisis Data*. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana UPN Veteran. Surabaya. <http://www.docstoc.com/docs/65074617/metode-ri-set-agribisnis>. [2 Desember 2011].

Elisabeth, Dian Adi A, *et al.* 2006. *Analisis Finansial Usaha Pembuatan Virgin Coconut Oil (Vco) Cara Fermentasi*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali. <http://www.analisisfinansial.com/>. [28 November 2011].

Hendayana, R., S. Bustaman, N. Sunandar, dan E. Jamal. 2009. *Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.

Hermawan H, dan H. Andrianyta. 2012. *Lembaga keuangan mikro agribisnis: terobosan penguatan kelembagaan dan pembiayaan di perdesaan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 10 Nomor 2, Juni 2012. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.

Hermawan H, dan R. Hendayana. 2011. *Peran bantuan langsung masyarakat melalui PUAP terhadap struktur pembiayaan dan pendapatan usahatani*. *Prosiding Seminar Nasional Petani dan Pembangunan Pertanian*. Bogor. 12 Oktober 2011. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.

- Kementerian Pertanian. 2010. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Jakarta, IAARD Press.
- Kushartanti, E, T. Suhendrata, dan S. Catur. 2011. Tanggapan petani terhadap penyelenggaraan SL-PTT dan penerapan komponen teknologi PTT padi sawah inbrida di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Prosiding Seminar Nasional Hasil Kegiatan Pengkajian dan Diseminasi Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian, Bogor, Tgl 9-11 Desember 2010.
- Mosher, A.T. 1978. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV. Yasaguna. Jakarta.
- Nurmanaf, A.Z. 2007. Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5(2). Juni. hal. 99-109. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Omobolanle, O.L, S. OLU. 2005. Adoption behaviour of farmers in Southwest, Nigeria: The case of soybean farmers. Journal Central European of Agriculture. Vol 6(4). hal 415-426.
- Swastika, D.K.S. 2004. Beberapa teknik analisis dalam penelitian dan pengkajian teknologi pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Vol. 7(1), Januari 2001. hal. 90-103.
- Syukur, M. 2009. Bank Pertanian: Pembiayaan Alternatif Untuk Petani. (<http://psp.ipb.ac.id/x/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=390>). [22 Juni 2010].
- Zhu, Chao. 2006. The financial suport in the process of construction of rural area India and revelation to China. Academic Journal of Zhongzhou, No.5. pp.69-72.